

RPSEP-44

REFLEKSI PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PADA KABINET INDONESIA BERSATU JILID II

Purwaningdyah Murti Wahyuni, SH., M. Hum

UPBJJ UT Semarang

[*purwaningdyah@ut.ac.id*](mailto:purwaningdyah@ut.ac.id)

dan

Siswandaru K., SE., Akt, M. Si

UPBJJ UT Semarang

ndarufekon@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian besaran inflasi pada suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan dan perputaran seluruh sumber daya ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2013 adalah sebesar 6,2% pada tahun 2010, sebesar 6,5% pada tahun 2011, sebesar 6,3% pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 hanya sebesar 5,7%. Disamping itu pergerakan rata-rata laju inflasi Indonesia pada periode yang sama yang ditargetkan hanya berkisar sebesar 4%-6%, realisasinya masih belum sesuai dengan target yaitu sebesar 7% pada tahun 2010, sebesar 3,8% pada tahun 2011, sebesar 4,3% pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi sebesar 8% pada tahun 2013.

Beberapa hal dalam pengambilan kebijakan Pemerintah selama periode Kabinet Indonesia Bersatu II yang dianggap menjadi hal yang memicu belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengendalian inflasi Indonesia antara lain pengambilan kebijakan Pemerintah terhadap subsidi bahan bakar minyak yang berdampak pada peningkatan defisit APBN, semakin besarnya defisit neraca perdagangan akibat ketidakseimbangan ekspor dan impor serta defisit neraca transaksi berjalan akibat ketidakseimbangan inflow dan outflow devisa negara. Makalah ini akan menguraikan hal-hal yang menjadi faktor pemicu perlambatan ekonomi Indonesia dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi sesuai RPJMN 2010-2014.

Kata Kunci: refleksi, target, pertumbuhan ekonomi Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian besaran inflasi pada suatu negara merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pergerakan dan perputaran seluruh sumber daya ekonomi di suatu negara. Dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat adanya peningkatan atau penurunan dari perekonomian yang sedang terjadi disuatu negara, sedangkan pengendalian besaran inflasi dapat dijadikan patokan agar kestabilan perekonomian dapat dikendalikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ingin diciptakan oleh pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan
2010	6,2 %
2011	6,5 %
2012	6,3 %
2013	5,7 %

Sumber : Bank Indonesia

Disamping itu pergerakan rata-rata laju inflasi Indonesia pada periode yang sama yang ditargetkan hanya berkisar sebesar 4%-6%, realisasinya masih belum sesuai dengan target yang diinginkan yaitu sebesar :

Tabel 1
Rata-rata Laju Inflasi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan
2010	7 %
2011	3,8 %
2012	4,3 %

2013	8 %
------	-----

Sumber : Bank Indonesia

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sampai saat ini telah memberikan hasil pembangunan yang cukup baik. Dibandingkan dengan kondisi awal pada 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat dalam hal demokrasi adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bidang politik. Secara umum, kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi telah mengalami peningkatan, tetapi upaya sungguh-sungguh perlu terus dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif disertai dengan kerja keras dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dengan demikian, keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

B. METODOLOGI

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis kali ini adalah analisis deskriptis sederhana dengan bantuan literatur, dimana didalamnya penulis ingin mengemukakan segala sesuatu yang telah dicapai oleh KABINET INDONESIA BERSATU JILID II.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi serta Agenda Utama Pembangunan dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) Prioritas Nasional lainnya yang dapat kita lihat dalam Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Maret 2013) yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

- (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih,
- (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan
- (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- a) penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang didukung oleh pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemda;
- b) penguatan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penataan daerah, penggunaan dana perimbangan daerah, dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah;
- c) pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit;
- d) percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan;
- e) penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik; dan
- f) perbaikan data kependudukan melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), serta penerapan eKTP.

Secara umum, pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola masih kurang mengembirakan, yang ditunjukkan dengan tidak akan tercapainya beberapa target yaitu: persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda (daerah), peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan. Sedangkan Integritas pelayanan publik (daerah) dan persentase Kab/Kota yang akuntabel memerlukan kerja keras untuk mencapai target. Sementara indikator yang diperkirakan tercapai antara lain persentase K/L dengan opini WTP atas laporan keuangan K/L (pusat),

skor integritas pelayanan publik (pusat), persentase K/L yang Akuntabel, dan persentase provinsi yang akuntabel.

2. Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan terutama untuk :

- a. meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
- b. meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal;
- c. meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;
- d. meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- e. memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; dan
- g. memperkuat tata kelola pendidikan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang berdampak pada perbaikan kinerja pendidikan nasional.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yang diindikasikan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, peningkatan angka partisipasi murni (APM), dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di seluruh jenjang pendidikan. Pembangunan pendidikan hingga tahun 2012 telah mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bahkan capaian beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

Indikator pembangunan bidang pendidikan sampai dengan 2012 telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan arah pencapaian target RPJMN. Pencapaian dua Indikator utama bidang pendidikan adalah: Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,72 tahun pada 2009 menjadi 7,92 tahun pada 2011, demikian juga Angka Buta Aksara pada Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas juga telah berhasil diturunkan dari 5,3% pada 2009 menjadi 4,43% pada 2011. Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah juga menunjukkan perkembangan yang sama. Diperkirakan target RPJMN pada 2014 akan tercapai. Meskipun target-target bidang pendidikan dapat tercapai, namun masih terdapat ketidak-sesuaian dengan kebutuhan pendidikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa seperti: krisis karakter bangsa, penurunan daya saing,

korupsi yang merajalela, dan permintaan pasar tenaga kerja. Pendidikan tidak hanya memperkaya siswa dengan pengetahuan saja tetapi juga harus meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan pengembangan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Perbaikan kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2013, diharapkan bukan hanya memasukkan kurikulum budi pekerti, tetapi juga perlu memasukkan komponen etos kerja dan budaya anti korupsi untuk mengatasi krisis karakter bangsa yang terjadi saat ini. Kurikulum ini juga didesain sesuai dengan pasar kerja dan mendorong terjalinnya networking antara sekolah dengan dunia usaha.

3. Kesehatan dengan penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, dan menurunnya angka kelahiran total (total fertility rate/TFR). Pencapaian sasaran pembangunan nasional didukung melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan pemenuhan sumber daya kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Selain itu, didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu, penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, pengembangan manajemen dan informasi kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk melalui revitalisasi Program KB, serta penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Secara umum pencapaian sasaran pembangunan kesehatan masih kurang menggembirakan, seluruh capaian indikator.

Dalam laporannya pemerintah berasumsi bahwa keadilan sosial ditunjukkan oleh meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2011 cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan mencapai 64,58%, yang dilaksanakan melalui Program Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan jaminan kesehatan lainnya. Dengan demikian masih ada sekitar 35,42% masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target 2014 sebesar 100% penduduk terlayani jaminan kesehatan. Hal yang harus dilakukan antara lain pemerintah harus mempercepat

terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar pelayanan kesehatan akan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, mulai pekerja hingga rakyat miskin. Selain itu pemerintah perlu memastikan agar ketepatan data sasaran Jamkesmas di daerah benar-benar akurat sehingga pelayanan jaminan sosial dapat semakin optimal. Dalam prakteknya ternyata masih banyak hal-hal yang membuat BPJS terkendala oleh berbagai masalah, tentu hal ini amat sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka penyempurnaannya.

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan status kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan, namun untuk mencapai target UHH pada 2014 perlu kerja keras terutama melihat perkembangan AKI dan AKB yang kurang memuaskan. AKB pada 2012 adalah sebesar 32 (hasil sementara SDKI 2012). Angka ini lebih rendah dari AKB 2009 sebesar 34. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan bidang kesehatan. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh dari target penurunan AKB dalam RPJMN 2014. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengupayakan capaian target tersebut, diantaranya dengan memperluas cakupan pelayanan kunjungan neonatal, imunisasi, pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan tersebut agar dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berada di daerah tertinggal. Hal penting lainnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

4. Penanggulangan Kemiskinan termasuk perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat melalui berbagai program penang-gulangan kemiskinan. Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 % pada 2009 menjadi 11,66 % pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju per-tumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan

yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 % pada tahun 2014.

Dalam *Bisnis.com* tanggal 10 Agustus 2014, Pemerintah mengaku berat untuk mencapai target kemiskinan tahun ini sebesar 10,5% seiring dengan tren perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang masih berlangsung apalagi pada kuartal II/2014 perekonomian Indonesia hanya melaju 5,12%. Walaupun optimistis target pengangguran 5,8% - 5,9% tidak akan terlampaui karena pada Februari lalu tingkat pengangguran sebesar 5,7%. Kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan butuh *extra effort* jika tetap ingin mencapai target kemiskinan. “Terakhir 11,25% ya memang berat. Jadi kan kalau mau akhir tahun harus 0,75% ,” ungkap beliau. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Maret 2014 sebesar 11,28% turun tipis 0,08% dari periode yang sama sebelumnya 11,36%. Capaian penurunan kemiskinan tersebut merupakan kinerja terburuk pemerintah setidaknya sejak tiga tahun terakhir. Bahkan, capaian tersebut juga lebih rendah dari prediksi angka kemiskinan Maret 2014 dari Bank Dunia sebesar 11%-11,1%. Adapun, angka kemiskinan Maret 2013 tercatat turun 0,59% dari 11,96%. Sementara angka kemiskinan Maret 2012 turun 0,53% dari 12,46%. Tak tanggung-tanggung, belum lama ini Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan sulit mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5% seperti yang disepakati pemerintah dengan Banggar DPR dalam APBN-P 2014. Hasil hitungannya, pemerintah hanya sanggup mengejar pertumbuhan 5,3%. Armida mengatakan walaupun berdampak pada sulitnya pencapaian target kemiskinan, perlambatan ekonomi saat ini memang difokuskan untuk proses restrukturasi dan transformasi perekonomian lewat mitigasi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan.

5. Ketahanan Pangan serta lanjutan revitalisasi pertanian.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian dan perikanan; dan peningkatan pendapatan petani; serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang perlu dicapai yaitu terciptanya kemandirian ketahanan pangan pada akhir

tahun 2014 pencapaian surplus beras 10 juta ton dan meningkatnya produksi komoditas pangan utama lainnya, meningkatnya PDB sektor pertanian sekitar 3,7 % per tahun dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Secara umum, selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 % per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 % per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009.

Peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah petani yang cukup besar. Salah satu Indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN, nilai NTP meningkat dari 101,20 (2009) menjadi 105,76 pada 2012. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mendekati angka target pada 2014 sebesar 115-120. Kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya pada stabilitas harga, tetapi juga pada peningkatan produksi beberapa komoditi pangan utama (padi, jagung, tebu dan perikanan) yang kurang memadai, bahkan produksi kedelai mengalami penurunan. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas harga komoditi pangan, upaya yang perlu dilakukan adalah akselerasi program swasembada pangan terutama kedelai dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

6. Infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran pembangunan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 alokasi anggaran untuk infrastruktur terhadap PDB terus ditingkatkan

dari 3,4 % pada tahun 2010, menjadi 4,1 % pada tahun 2012, sehingga diharapkan akan mengarah pada pemenuhan minimal 5 % dari PDB. Peningkatan tersebut merupakan upaya kuat dari pemerintah untuk terus mendorong agar dunia usaha di Indonesia tetap bergairah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 6,3–6,8 %, sesuai sasaran RPJMN 2010-2014, di tengah-tengah perekonomian dunia yang cenderung tidak ada perubahan.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan pula melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dari estimasi nilai investasi KPS dalam RPJMN 2010-2014 sebesar Rp344.6 triliun, sampai saat ini proyek KPS yang telah selesai transaksi dan mulai konstruksi adalah sebesar Rp. 32 triliun. Pada tahun 2012 telah digulirkan peluang investasi proyek KPS sejumlah 58 proyek dengan perkiraan total investasi mencapai Rp. 500 Triliun, dimana saat ini 17 proyek senilai Rp. 98 trilliun sedang dalam proses transaksi dan 13 proyek senilai Rp. 58 trilliun sedang dalam proses persiapan transaksi. Dengan semakin memadainya alokasi anggaran infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan eksporimpor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014, dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai.

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-2014 terutama dalam upaya meningkatkan keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) yang dilaksanakan melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, secara umum akan dapat dicapai. Hingga akhir tahun 2012 terdapat pertambahan jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dari 87,3 % pada awal tahun 2009 menjadi 90,82 % pada akhir tahun 2012. Berdasarkan kinerja kemanfaatannya, penambahan lajur-Km dan lebar jalan telah menghasilkan rasio volume lalu lintas dengan kapasitas (*V/C ratio*) jalan nasional rata-rata mencapai 0,41, yang berarti bahwa terdapat ruang pemanfaatan jalan yang masih memadai.

Sementara itu capaian pembangunan jalan tol hingga Juni 2012, terdapat penambahan panjang jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi sepanjang 86,19 Km baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta. Capaian tersebut masih jauh dari target RPJMN sepanjang 1.296 km sehingga memerlukan upaya yang keras dan sungguh-sungguh khususnya terkait dengan hambatan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS, dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. Pertumbuhan yang baik terjadi pada PMTB, PMA, dan PMDN. Pertumbuhan PMTB tahun 2010 dan 2011 masing-masing 8,5 % dan 8,8 %, lebih cepat dari pertumbuhannya pada 2009 yaitu 3,3 %. Pada tahun 2012 PMTB tumbuh mencapai 10 % (y-o-y, hingga Semester I). Selanjutnya, PMDN meningkat dari Rp37,8 triliun pada 2009 menjadi Rp76,0 triliun pada tahun 2011, demikian pula PMA meningkat dari USD 10,8 juta menjadi USD19,5 juta. Hingga tahun 2012 Triwulan III, realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp. 25,2 triliun dan USD6,3 juta atau masing-masing meningkat sekitar 37% dan 22% dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2011. Selain itu, peringkat investasi Indonesia telah membaik sehingga dimasukkan dalam kategori negara yang layak investasi (investment grade), yaitu Fitch: BBB-, Moody's: BAA3, dan Standard & Poors: BB+. Peningkatan peringkat ini merupakan cerminan perbaikan persepsi terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat investment grade akan menambah kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Laporan *World Economic Forum (WEF)* juga menyebutkan bahwa posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi ke-46 pada tahun 2011 menjadi posisi ke-50 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam iklim investasi di Indonesia, yang disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan korup, infrastruktur tidak memadai, etika kerja buruk, peraturan buruh yang membatasi, akses pada pembiayaan yang sulit, kurangnya jumlah tenaga kerja terdidik, dan rendahnya kemampuan berinovasi. Jika segala hambatan diatas tidak segera diatasi maka diprediksi target peringkat ke-75 dalam kemudahan berusaha (IFC) pada tahun 2014 tidak akan tercapai. Diperkirakan pada 2014 peringkat kemudahan berusaha hanya berada pada kisaran di atas 100. Untuk mencapai target penurunan tingkat korupsi dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah akselerasi secara menyeluruh, misalnya melalui:

- a) penegakan hukum secara konsisten dan pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi;
- b) penguatan dan pembenahan institusi penegak hukum beserta perangkat yang ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengadilan (MA, MK, KY);
- c) menyelesaikan dengan segera kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi;
- d) penguatan peran dan fungsi KPK dan pengadilan TIPIKOR; dan
- e) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang diperluas baik sasaran maupun kualitasnya, seperti, penerapan pakta integritas, kontrak kinerja, pengembangan IKU pada instansi pemerintah, serta evaluasi kinerja program/kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi.

RPJMN 2010-2014 menyebutkan pentingnya penegakan pilar demokrasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang demokratis. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap hak azasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, dan jaminan terhadap keberagaman. Berkaitan dengan itu, penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia juga dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan harmoni interaksi antarlembaga tersebut, yang mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala

macam bentuk diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggungjawab. Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia mendapat catatan kritis dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei 2012, di Jenewa, Swiss. Sebanyak 74 negara berpartisipasi dalam sidang UPR tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan menerima 179 rekomendasi yang disampaikan oleh UPR, dengan rincian langsung mengadopsi 143 rekomendasi dan akan mempertimbangkan kembali 36 rekomendasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan bersungguh-sungguh dalam penghapusan diskriminasi, intoleransi beragama, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta impunitas atas kasus pelanggaran HAM berat.

Pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil merupakan salah satu pilar demokrasi penting. Sasaran pemerintah dalam bidang politik seperti yang tertuang dalam RPJMN adalah Pemilu yang adil dan tidak diskriminatif dengan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 mencapai 75 % dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 yang mencapai skor 73. Pencapaian partisipasi politik masyarakat dalam pemilu baru dapat diketahui setelah pelaksanaan pemilu pada 2014. Dalam laporan Freedom of the World 2012, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang bebas (*Freedom Status: Free*) bersama negara-negara maju karena mampu memberikan dan menjaga hak politik dan kebebasan sipil masyarakat. Freedom House menilai skor Tingkat Kebebasan (*Freedom Rating*) Indonesia sebesar 2,5 (skala 0-10, semakin kecil semakin baik) dan dapat dipertahankan sejak 2009 sampai 2012.

Kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan salah satu pendukung demokrasi yang penting juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh dicabutnya kewenangan Jaksa Agung untuk melarang peredaran buku pada tahun 2010, terjaminnya kebebasan pers dan penggunaan internet. Penilaian *Freedom House* atas kondisi kebebasan pers dan penggunaan internet di Indonesia merupakan gambaran terjaganya kondisi kebebasan pers yang semakin membaik. Sampai 2012 Indonesia memperoleh status Partly Free dalam bidang pers, dengan skor kebebasan pers (Freedom of Press) yang semakin membaik, yaitu dari 54 pada tahun 2009 menjadi 49 pada 2012. Perbaikan skor ini didukung oleh membaiknya skor pada lingkungan legal dan politik. Terjaganya pemenuhan hak politik, kebebasan sipil masyarakat dan membaiknya kebebasan pers merupakan capaian

penting dalam pembangunan pilar-pilar demokrasi. Meskipun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh:

- a. meningkatnya jumlah kekerasan di masyarakat dan antarkelompok masyarakat sebagai dampak dari masih adanya politik pragmatisme-transaksional pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan permasalahan institusional politik yang berpotensi pada munculnya political distrust;
- b. adanya masalah prosedural pemilu dalam bentuk belum akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya hambatan hak memilih dan dipilih, dan masih buruknya fasilitas penyandang cacat pada Pemilu;
- c. terbatasnya kaderisasi dalam parpol; dan
- d. masih rendah peran DPRD, terutama dalam pelaksanaan hak inisiatif.

Diprediksi bahwa sasaran RPJMN 2014 untuk penegakan pilar demokrasi masih berpotensi dapat dicapai melalui pelaksanaan :

1. Penyusunan DPT secara profesional, partisipatif dan transparan;
2. Pendidikan politik dan pemilih tepat sasaran, penggunaan budaya lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Pengawasan secara intensif penyelesaian peraturan perundangan bidang politik agar tepat waktu;
4. Desain bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu;
5. Pengawasan ketersediaan anggaran untuk tahapan pemilu agar tepat waktu;
6. Perhatian pada penyediaan fasilitasi penyandang cacat.

Wujud dari penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan dilaksanakan melalui peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Agenda penegakan hukum mencakup keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk proses penjabarannya, pengawasannya dan penegakan aturan hukumnya. Beberapa indikator utama pada agenda ini, yaitu jumlah penyelesaian perkara, baik di tingkat Peradilan Umum dan MA, dan penanganan kasus korupsi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target

RPJMN, sementara indikator penyelesaian Prolegnas diperkirakan akan sangat sulit dicapai pada tahun 2014.

Salah satu penyebab buruknya penilaian masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebagai contoh adalah adanya peraturan yang mengharuskan para penegak hukum untuk meminta izin kepada Presiden dalam melakukan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Sementara itu, proses pembuatan undang-undang berjalan lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian Prolegnas setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kebuntuan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif, karena capaian Prolegnas adalah hasil kompromi antara DPR dan Pemerintah.

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran daripada fungsi legislasi. Rendahnya capaian Prolegnas perlu dijadikan bahan koreksi bersama antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan target Prolegnas dalam tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, perlu perbaikan /peningkatan efektifitas komunikasi dan penyesuaian target Prolegnas dengan mempertimbangkan kemampuan penyelesaiannya. Jika hal ini tidak segera diatasi maka diprediksi target Prolegnas tahun 2014 tidak akan tercapai.

8. Energi yang diprioritaskan pada terjaminnya kelangsungan pertumbuhan nasional dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluasluasnya.
 - a) Kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi guna menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional. Substansi inti dari kebijakan bidang energi mencakup antara lain kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif khususnya panas bumi, dan konversi penggunaan sumber energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sasaran yang ingin dicapai dalam kapasitas energi adalah: (a) produksi minyak bumi mulai tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari; (b) tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 3.000 megawatt (MW) per tahun; (c) rasio elektrifikasi sebesar 80 % pada tahun 2014; dan (d) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi alternatif, khususnya panas bumi, mencapai 5.000 MW. Sedangkan sasaran

dalam konversi penggunaan gas adalah: (a) terbangunnya jaringan gas kota di 19 kota dengan 80.000 sambungan rumah, dan;

b) terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 21 unit. Secara umum, pencapaian sasaran utama pembangunan bidang energi masih belum menggembirakan, terutama produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diarahkan pada:

- a) antisipasi dampak dan pengendalian laju perubahan iklim;
- b) upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c) pengembangan sistem peringatan dini; dan
- d) penanggulangan bencana.

Hal tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran utama, yaitu Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana. Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana dilakukan guna mengantisipasi perubahan iklim. Secara umum sasaran pembangunan tersebut telah tercapai (lihat Tabel IV.15). Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, yakni dari 66 % pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Ini merupakan wujud dari upaya perbaikan kondisi lingkungan dan penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan yang ada saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang diantaranya adalah pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik yang mengutamakan dan menjamin pertumbuhannya keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya. Sedangkan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Secara umum pencapaian sasaran Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator utama prioritas ini, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014. Namun demikian target pengentasan daerah tertinggal yang sedikitnya mencapai 50 Kabupaten pada 2014, diperkirakan akan tercapai.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh rakyat tanpa membuat kesenjangan dan disparitas. Walaupun selama ini Pemerintah sudah bekerja keras untuk dapat menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, tetapi beberapa indikator utama dalam RPJMN diperkirakan akan sulit untuk dicapai targetnya. Beberapa target tersebut antara lain persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dan angka kemiskinan daerah tertinggal. Jangkauan pelayanan kesehatan perlu diperluas, khususnya melalui perluasan cakupan sistem jaminan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu pengelolaan di bawah BPJS kesehatan, yang mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Jamkesda.

Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi, perlu dipercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat padat karya. Sebagai contoh, percepatan pembangunan bidang pertanian, terutama akselerasi program swasembada pangan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan akses petani pada sumber daya produktif, dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyiapkan program/kegiatan daerah yang

mendukung. Demikian juga dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan sekitarnya perlu lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah, yang selanjutnya akan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan pada pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya diperlukan untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa. Hal ini harus didukung dan disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim kepulauan. Maka, untuk mencapai hal-hal tersebut disusunlah arah Kebijakan prioritas pembangunan di bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, yaitu: (1) meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, (2) mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya, serta (3) menguatkan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis. Sementara sasaran pembangunannya adalah: (1) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (2) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; (3) penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; dan (4) terselenggaranya paket riset insentif SINAS, yang terdiri atas insentif riset dasar, insentif riset terapan, insentif difusi iptek dan insentif peningkatan kapasitas iptek. Pembangunan prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi hingga bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014, bahkan capaian beberapa indikator bidang tersebut telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014

12. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, khususnya pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan/penangkalan terorisme.

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencakup substansi inti penanggulangan terorisme, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, pembangunan bidang hukum, dan pendayagunaan industri pertahanan. Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2010–2014 untuk penanggulangan terorisme ditekankan pada pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme, dan pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia dilakukan antara lain melalui partisipasi aktif dan prakarsa Indonesia dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan melaksanakan kerja sama internasional dalam penanganan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum PBB; dan meningkatnya kerjasama multilateral dalam isu perdamaian dunia. Arah kebijakan pembangunan hukum adalah terwujudnya penegakan hukum, terjaganya ketertiban umum dan tercapainya peningkatan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Saat ini yang menjadi prioritas Pemerintah adalah mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Sasaran outcome dalam pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 dengan skor 5. Salah satu sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar 25-27,5 % dari kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar, dengan dukungan dari industri pertahanan nasional yang kuat dan handal. Oleh karena itu, pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta Road Map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya merupakan arah kebijakan yang sangat strategis bagi upaya kemandirian alutsista TNI sekaligus untuk mengurangi ketergantungan alutsista produksi luar negeri.

13. Bidang Perekonomian yang terkait dengan kebijakan Industri Nasional dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Arah kebijakan PN Lainnya di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Selain itu, hingga saat ini telah tercapai pertumbuhan pada sektor non-migas; pemantapan peran Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional; dan perbaikan pelayanan terhadap TKI. Sasaran PN perekonomian secara umum tercapai, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri.

Pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan perbaikan yang nyata walaupun masih ada indikator yang kurang memuaskan sehingga untuk mencapainya diperlukan kerja keras, perbaikan dan perkuatan program.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia telah diakui dunia internasional antara lain dengan bergabungnya Indonesia dalam kelompok G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 % PDB dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global. Selain itu, di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup memuaskan dari 4,6 % di tahun 2009 menjadi 6,3 % di triwulan dua tahun 2012. Demikian juga dengan laju inflasi berhasil dikendalikan, dari 7% pada tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 % pada tahun 2012. Penurunan Inflasi ini mampu mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan cukup besar dari 6,6 % di tahun 2010 menjadi 4,2 % tahun 2012, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan lebih mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil.

Selama tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 7,87% pada 2009 menjadi 6,32% pada 2012. Berdasarkan progres tersebut, target pengangguran terbuka pada 2014 sebesar 5-6% diperkirakan tercapai. Untuk mempertahankan laju perbaikan TPT, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan upaya mengatasi kendala-kendala inefisiensi yang menurunkan daya saing produk Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah 2,

tingkat korupsi yang tinggi, dan infrastruktur yang masih terbatas. Selanjutnya tuntutan kenaikan upah buruh yang tidak diikuti perbaikan kendala-kendala yang ada akan membebani pengusaha dan akan berdampak pada pemutusan kerja.

Menurut P.A. Samuelson dalam Buku Pengantar Ilmu Ekonomi, Wawan Hermawan (Universitas Terbuka : 2014) dikatakan bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi perekonomian yaitu :

1. Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi
2. Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah.
3. Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Dalam Pengantar Ekonomi Makro (Sony Harry B. , Universitas Terbuka : 2012) dikatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu :

1. Tanah dan kekayaan alam
 2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
 3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi
 4. Sistem sosial dan Sikap Masyarakat
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya mencakup : Peningkatan kerukunan umat beragama maupun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Pembangunan PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui pembangunan Agama, Pariwisata, Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan, serta Pemuda dan Olahraga. Kebijakan pembangunan agama diarahkan untuk:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. pelaksanaan haji yang tertib dan lancar.

Adapun sasaran utama pembangunan bidang agama dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji yang tertib dan lancar. Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan destinasi, peningkatan promosi pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata, dan penguatan kelembagaan pariwisata. Sasaran utama pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2010-2014 adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 % secara bertahap dalam lima tahun. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada:

- 1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan;
- 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Sasaran utama pembangunan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut:

- (a) pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; dan
- (b) peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, serta revitalisasi gerakan pramuka.

Pengaruh pengutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan difokuskan pada perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG&A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya. Sasaran utama pembangunan bidang PUG serta perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah:

- (1) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah dan
- (2) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak, terhadap berbagai tindak kekerasan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Maret 2013) dapat kita lihat bagaimana pemerintah dalam Kabinet ini berusaha dengan keras agar semua yang dicita-citakan RPJMN 2010-2014 dapat dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan. Namun

memang banyak sekali kendala yang terus dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya yang perlu dilakukan dalam sisa waktu yang ada ini adalah :

1. Mengoptimalkan dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia hingga dilantiknya Presiden terpilih yang baru.
2. Meningkatkan dan menjaga kesolidan kinerja pemerintahan dari masing-masing departemen hingga masa akhir jabatan.
3. Menyegerakan segala rencana yang masih tertunda dengan semaksimal mungkin sampai dengan masa akhir jabatan.
4. Berkoordinasi dengan dengan baik antara Presiden lama dengan calon Presiden yang baru, sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif untuk saling memahami segala potensi kelemahan dan keunggulan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, sebagai bentuk persiapan pembentukan pemerintahan yang baru nantinya agar tidak terlalu tertinggal akan informasi yang ada dari pemerintahan yang lama.

Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna menjelaskan dalam RPJMN 2014-2019 akan memfokuskan pada :

1. Pembangunan infrastruktur dasar seperti pemerataan ketersediaan listrik seluruh Indonesia. 100 persen masyarakat Indonesia harus menikmati listrik pada tahun 2019,
2. Permasalahan ketersediaan air minum juga menjadi perhatian Bappenas untuk diselesaikan. Saat ini ketersediaan air minum hanya 81%, dengan pertumbuhan sekitar 3% per tahunnya. Diperkirakan dengan pertumbuhan normal ketersediaan air minum pada 2019 tidak dapat diperoleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimana pada saat ini hanya sekitar 90% saja untuk ketersediaan air minum,
3. Permasalahan sanitasi dan kepemilikan rumah pada seluruh masyarakat Indonesia juga menjadi perhatian. Ia mengatakan RPJMN kali ini akan memperbaiki infrastruktur dasar tersebut.
4. Selain itu Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah supaya naik kelas menjadi upper middle income. Namun, ketersediaan dana pemerintah dalam menjalankan rancangan tersebut menjadi kendala. Pemerintah membutuhkan dana sebesar US\$ 5400 triliun. Sedangkan ketersediaan dana pemerintah sebesar US\$ 1200 triliun. Hanya sanggup 22%. Sisanya 78% dapat dari mana itu yang perlu dibahas dengan pemerintahan yang baru.

Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu diungkapkan dalam hal ini selain apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, namun pada tulisan kali ini penulis beranggapan bahwa hal-hal tersebut merupakan hal pokok yang mesti disampaikan dan digarap lebih selektif karena hal ini akan menyangkut kepada seluruh kebutuhan yang lain.

D. PENUTUP

Dari beberapa telaah yang ada dapat disimpulkan bahwa sebenarnya baik pemerintahan yang lama dalam hal ini KABINET INDONESIA BERSATU JILID II telah berusaha keras melaksanakan tugasnya, namun memang masih sangat banyak kekurangannya, namun tidak dimungkiri bahwa Kabinet yang dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudoyono ini juga memiliki kelebihan atau keberhasilan yang cukup banyak.

Ditengah badai yang menimpa baik dari dalam ataupun dari luar negeri, yang pasti hingga detik ini kita masih mampu berdiri tegak dinegeri tercinta ini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada didalamnya. Puas tidak puas, mau tidak mau, kurang atau lebih kondisi kita saat ini, pemilik negeri ini adalah kita bersama. Dan tugas kita bersama adalah ikut menjaga segala hal yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh lapisan rakyat negeri ini dan membangunnya dengan segenap kemampuan yang ada, hingga akhir hayat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Maret 2013), Buku Laporan EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014

P.A. Samuelson dalam Buku Pengantar Ilmu Ekonomi, Wawan Hermawan, Penerbit :
Universtias Terbuka Edisi ke-13. 2014

Sony Harry B., 2012. "Pengantar Ekonomi Makro" , Penerbit : Universitas Terbuka

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20140810/9/248874/pemerintah-akui-target-kemiskinan-sulit-tercapai>

<http://www.gatra.com/ekonomi-1/55494-rpjmn-2014-2019,-bappenas-susun-rancangan-untuk-pemerintahan-baru%E2%80%8F.html>